

KAJIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Rudin M¹, R. Suprpty², Diarespati³

¹Program Studi Pasca Sarjana MM STIE Panca Bhakti Palu
rudin.ternate@gmail.com

²Pogram Studi Manajemen STIE Panca Bhakti Palu
rikasu.hidar@gmail.com

³Program Studi Akuntansi STIE Panca Bhakti Palu
diarespati1987@gmail.com

Abstract

The aim of this study was to determine and analyze the Effect of Tax Revenue Sharing Funds, and Specific Allocation Funds on Gross Regional Domestic Product in Central Sulawesi Province. The type of data used is quantitative data. Data processing uses SPSS 18 program assistance. The results of the study show that (1) Tax Revenue Sharing Funds and Special Allocation Funds together have a positive and significant impact on Gross Regional Domestic Product in Central Sulawesi Province. (2) Tax-sharing fund has a positive but not significant effect on Gross Regional Domestic Product in Central Sulawesi Province (3) Special Allocation Fund has positive but not significant effect on Gross Regional Domestic Product in Central Sulawesi Province.

Keywords: Tax-Sharing Fund, Special Allocation Fund and Gross Regional Domestic Product

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Khusus pada Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Pemrosesan data menggunakan bantuan program SPSS 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Dana bagi hasil pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Produk Domestik Regional Bruto

Pendahuluan

Aplikasi otonomi daerah di
Republik Indonesia merujuk pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana penjelasan Abdul Halim (Halim, 2012) yaitu pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan “bahwa melaksanakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengendalikan dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan desentralisasi memberi kewenangan kepada pemerintah daerah secara leluasa dalam mengelola sumber daya daerahnya secara lebih mandiri. Masing-masing daerah memperoleh otoritas dan diharuskan untuk meningkatkan otonomi daerah yang memungkinkan daerah merdeka dalam mengolah sumber daya daerah hingga mewujudkan pengembangan daerah yang adil. Pendanaan utama pemerintah daerah bersumber dari penghasilan daerah yang digunakan dalam melaksanakan pengembangan di setiap daerah. Tujuan utama pengembangan daerah adalah menghasilkan PDRB dan

memeratakan pengembangan daerah, yaitu berupa pemerataan penghasilan masyarakat di daerah dan pemerintah daerah, (Widjaja, 2002)

Pemerintah daerah diharuskan berdikari dalam mengatur penghasilan daerah yang diarahkan untuk proses penataan kembali pengembangan daerah. Bila investasi bertambah maka penghasilan daerah akan bertambah dan mempengaruhi arus peningkatan PDRB suatu daerah. Perekonomian akan dinilai memperoleh peningkatan bila level aktivitas ekonomi yang diperoleh dimasa kini lebih tinggi dari yang diperoleh pada masa sebelumnya. Bila akumulasi fisik barang dan jasa yang diproduksi pada suatu perekonomian tersebut lebih besar dari masa sebelumnya pada waktu yang lalu maka bisa disebutkan telah terjadi PDRB, (Halim, 2012)

PDRB merupakan pertumbuhan aktivitas dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan pada masyarakat meningkat sehingga terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat, (Sadono, 2010). PDRB berhubungan

dengan proses perkembangan hasil barang dan jasa. PDRB daerah yang dinilai dengan hasil produksi dan penghasilan daerah. PDRB menilai kinerja dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu masa ke masa berikutnya. Selanjutnya PDRB adalah salah satu kriteria yang sering dipakai dalam menentukan kesuksesan pengembangan suatu daerah. Dengan kata lain PDRB digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu daerah karena berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Salah satu target pembangunan di daerah adalah terciptanya PDRB (Halim, 2012)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 11 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam. (Indonesia R. , 2004)

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dibagi antara daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90 % (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi;
- b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk biaya pemungutan.

2) Dana Bagi Hasil BPHTB

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB dibagi 20 % untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk Daerah Kabupaten dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah.
- 3) Dana Bagi Hasil PPh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh dibagi 80 % untuk Pemerintah Pusat dan 20 % untuk Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut (Indonesia P. R., 2000) :

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 untuk pemerintah dibagi dengan imbang 60% (enam puluh persen) untuk Kabupaten/Kota dan 40%

(empat puluh persen) untuk Provinsi.

- b. Penyaluran Dana Bagi Hasil dilaksanakan secara triwulanan.

Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialihkan kepada Daerah tertentu dengan maksud untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Rincian Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut: (Indonesia R. , 2004)

Pasal 39

- (1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

(2) Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasal 40

- (1) Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah salah satu kriteria yang biasa diaplikasikan untuk menentukan kesuksesan pembangunan. PDRB ini nantinya dimanfaatkan sebagai penilaian atas pertumbuhan atau kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah disebabkan berhubungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat khususnya dalam hal menaikkan hasil barang dan jasa. Peningkatan tersebut yang diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap kenaikan PDRB menjadi salah satu sasaran pembangunan baik di level nasional maupun di daerah. Ukuran PDRB di

level nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

PDRB dapat mengakibatkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, ia memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan mutu kehidupan dan distribusi penghasilan. Dampak negatifnya, PDRB menimbulkan timbulnya sifat konsumerisme, kerusakan ekosistem, ketidakmerataan ekonomi untuk sebagian besar masyarakat miskin. PDRB akan tercapai bila masyarakat mampu mengatur sumberdaya, baik barang maupun jasa, menjadi sesuatu yang lebih bernilai.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan penelitian verifikatif

adalah penelitian yang melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Sampel

Kriteria-kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dimekarkan sebelum tahun 2013 – 2015.
- (3) Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mempublikasikan realisasi APBD tahun 2013 – 2015.

Sesuai kriteria di atas maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 dengan rincian 11 Kabupaten/Kota dikalikan 4 tahun yaitu 44.

Teknik Analisa Data

Pendekatan model analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2007) :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Y = Produk Domestik Regional Bruto

X₁ = Dana Bagi Hasil Pajak

X₂ = Dana Alokasi Umum

X₃ = Dana Alokasi Khusus

a = Konstanta

b₁b₂ = Koefisien Regresi.

e = Variabel pengganggu

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif setiap variabel dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang keadaan variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini. Dari analisis deskriptif ini maka dapat diketahui realisasi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) di Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis deskriptif dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1

**Rata-Rata Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 (dalam rupiah)**

No	Kabupaten / Kota	Tahun Anggaran			Peningkatan DBHP 2012-2015	Persentase Perkembangan		Rata-rata Perkembangan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		2013- 2014	2014- 2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	12
1	Palu	27,728,170,160	17,968,316,642	20,343,992,050	22,013,492,951	(35.20)	13.22	(10.99)
2	Kab. Banggai	37,447,216,086	35,817,746,871	27,127,487,134	33,464,150,030	(4.35)	(24.26)	(14.31)
3	Kab. Banggai Kepulauan	24,091,326,801	10,210,881,822	10,118,392,867	14,806,867,163	(57.62)	(0.91)	(29.26)
4	Kab. Buol	22,389,739,542	13,705,274,477	13,433,397,415	16,509,470,478	(38.79)	(1.98)	(20.39)
5	Kab. Donggala	27,483,481,160	17,702,851,368	16,226,590,900	20,470,974,476	(35.59)	(8.34)	(21.96)
6	Kab. Morowali	47,359,654,381	18,248,936,301	15,589,902,236	27,066,164,306	(61.47)	(14.57)	(38.02)
7	Kab. Parigi Moutong	26,541,772,234	15,614,756,910	14,723,275,500	18,959,934,881	(41.17)	(5.71)	(23.44)
8	Kab. Poso	30,025,388,183	18,166,313,660	16,310,088,600	21,500,596,814	(39.50)	(10.22)	(24.86)
9	Kab. Sigi	17,774,197,358	15,198,419,804	11,211,984,050	14,728,200,404	(14.49)	(26.23)	(20.36)
10	Kab. Tojo Una Una	23,279,454,606	15,056,394,169	13,171,650,371	17,169,166,382	(35.32)	(12.52)	(23.92)
11	Kab. Toli-Toli	19,965,886,835	17,611,161,428	11,874,614,383	16,483,887,549	(11.79)	(32.57)	(22.18)
Jumlah		304,086,287,346	195,301,053,452	170,131,375,506	223,172,905,435	(375.3)	(124.1)	(249.69)
Terendah		Kab. Sigi	Kab. Bangkep	Kab. Bangkep	Kab. Sigi	Kab. Banggai	Kab. Bangkep	Kota Palu
Tertinggi		Kab. Morowali	Kab. Banggai	Kab. Banggai	Kab. Banggai	Kab. Morowali	Kab. Toli Toli	Kab. Morowali

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah 2017, data diolah.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Kota Palu periode Tahun 2013 – 2015 mengalami fluktuasi, dimana Tahun 2015 meningkat dari Tahun 2014. Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan karena adanya peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak seperti pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penghasilan. Kemudian

realisasi Dana Bagi Pajak Kabupaten Banggai Tahun 2013 dan 2015 mengalami penurunan. Menurunnya Dana Bagi Hasil Pajak disebabkan belum optimalnya sosialisasi pajak bumi dan bangunan serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diimplementasikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

Tabel 2
**Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 (dalam rupiah)**

No	Kabupaten / Kota	Tahun Anggaran			Peningkatan DAK 2012-2015	Persentase Perkembangan		Rata-rata Perkem bangan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		2013- 2014	2014- 2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	12
1	Palu	45,042,350,000	61,697,380,000	154,422,960,000	87,054,230,000	36.98	150.29	93.63
2	Kab. Banggai	68,285,040,000	81,720,980,000	110,046,545,000	86,684,188,333	19.68	34.66	27.17
3	Kab. Banggai Kepulauan	74,232,960,000	62,678,360,000	62,832,480,000	66,581,266,667	(15.57)	0.25	(7.66)
4	Kab. Buol	50,566,760,000	53,873,975,000	198,410,050,000	100,950,261,667	6.54	268.29	137.41
5	Kab. Donggala	80,352,470,000	63,351,428,000	215,149,451,000	119,617,783,000	(21.16)	239.61	109.23
6	Kab. Morowali	72,035,720,000	63,792,110,000	163,673,330,000	99,833,720,000	(11.44)	156.57	72.56
7	Kab. Parigi Moutong	82,492,140,000	83,047,870,000	135,772,040,000	100,437,350,000	0.67	63.49	32.08
8	Kab. Poso	73,980,930,000	82,058,250,000	190,888,740,000	115,642,640,000	10.92	132.63	71.77
9	Kab. Sigi	56,981,160,000	67,149,570,000	134,743,968,000	86,291,566,000	17.85	100.66	59.25
10	Kab. Tojo Una Una	71,661,770,000	75,756,450,000	204,531,730,000	117,316,650,000	5.71	169.99	87.85
11	Kab. Toli-Toli	68,020,880,000	75,730,880,000	89,764,920,000	77,838,893,333	11.33	18.53	14.93
	Jumlah	743,652,180,000	770,857,253,000	1,660,236,214,000	1,058,248,549,000	61.51	1,334.96	698.24
	Terendah	Palu	Buol	Bangkep	Bangkep	Kab. Morowali	Kab. Bangkep	Kab. Bangkep
	Tertinggi	Parigi Moutong	Parigi Moutong	Donggala	Donggala	Kota Palu	Kab. Buol	Kab. Buol

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Tengah 2017, data diolah.

Sesuai Tabel 2 diatas terlihat bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013 – 2015 mengalami fluktuasi setiap tahun. Penyebabnya adalah pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih terarah pada aktivitas investasi pengembangan, pengadaan, peningkatan, serta perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan infrastruktur sarana fisik penunjang, terkecuali penyertaan modal. Sebagai contoh,

penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan meliputi: (1) Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, (2) Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih (3) Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan, (4) Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas guru/kepala sekolah. Adapun berfluktuasinya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan karena adanya kebutuhan pembiayaan kegiatan khusus, yang merupakan kebutuhan yang tak terduga.

Tabel 3
Perkembangan Realisasi Poduk Domestik Regional Bruto
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013 – 2015 (dalam rupiah)

No	Kabupaten / Kota	Tahun Anggaran			Peningkatan PDRB 2012-2015	Persentase Perkembangan		Rata-rata Perkembangan
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015		2013- 2014	2014- 2015	
1	Palu	11,252,679	12,187,367	13,174,202	12,204,749	8.31	8.10	8.20
2	Kab. Banggai	8,276,980	8,712,900	11,670,841	9,553,574	5.27	33.95	19.61
3	Kab. Banggai Kepulauan	1,920,748	2,056,627	2,192,909	2,056,761	7.07	6.63	6.85
4	Kab. Buol	3,121,026	3,314,252	3,525,217	3,320,165	6.19	6.37	6.28
5	Kab. Donggala	6,458,762	6,861,815	7,281,673	6,867,416	6.24	6.12	6.18
6	Kab. Morowali	6,203,582	6,263,821	10,551,356	7,672,920	0.97	68.45	34.71
7	Kab. Parigi Moutong	8,841,960	9,442,592	10,131,718	9,472,090	6.79	7.30	7.05
8	Kab. Poso	4,450,517	4,791,549	5,163,362	4,801,809	7.66	7.76	7.71
9	Kab. Sigi	4,571,361	4,872,110	5,177,537	4,873,670	6.58	6.27	6.42
10	Kab. Tojo Una Una	2,852,668	3,052,374	3,220,424	3,041,822	7.00	5.51	6.25
11	Kab. Toli-Toli	4,160,306	4,427,892	4,730,885	4,439,694	6.43	6.84	6.64
Jumlah		62,110,590	65,983,299	76,820,125	68,304,671	68.52	163.28	115.90
Terendah	Kab. Bangkep	Kab. Bangkep	Kab. Bangkep	Kab. Bangkep	Kab. Morowali	Kab. Touna	Kab. Donggala	
Tertinggi	Kota Palu	Kota Palu	Kota Palu	Kota Palu	Kota Palu	Kab. Morowali	Kab. Morowali	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah 2017, data diolah.

Sesuai Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 – 2015 yang lalu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling tinggi di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu. Faktor yang menyebabkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Infrastruktur yang sudah memadai.

Infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian daerah. Infrastruktur yang bermutu dan merata dapat mempercepat fluktuasi barang antara

wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Kontradiksi infrastruktur inilah yang menjadi penyebab tidak meratanya pengembangan daerah. Untuk menunjang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Tengah maka kesediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan, pengairan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan bandar udara merupakan yang utama. Rendahnya infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas di Provinsi Sulawesi Tengah ditengarai sebagai penyebab Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfluktuasi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini Regresi Linear Berganda digunakan untuk

mengukur pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4
Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Dependen Variabel = Produk Domestik Regional Bruto				
Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	T	Sig
Constanta	-2,758	1,763	1,564	0,128
Dana Bagi Hasil Pajak	0,011	0, 63	0,174	0,863
Dana Alokasi Khusus	0,001	0,010	0,131	0,896
R-	= 0, 654			
R-Square	= 0, 427	F-Statistik	= 7,963	
Adjusted R-Square	= 0,374	Sig. F	= 0,000	

Sumber: Output SPSS. 16.

Model regresi yang diperoleh dari Tabel 4. sebagai berikut:

$$Y = - 2,758 + 0, 011X_1 + 0,015X_2 + 0,001X_3$$

Pembahasan

1. Kajian Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Dana Bagi Hasi Pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun

penjelasannya sebagai berikut bahwa apabila Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK), meningkat maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan meningkat di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebaliknya apabila Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun maka Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) akan menurun juga di Sulawesi Tengah.

Kesuksesan desentralisasi fiskal mempersyaratkan keberhasilan daerah dalam mengatur potensi keuangan daerah. Selain dari Pendapatan Daerah komponen penerimaan lainnya yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada setiap daerah. Sejak desentralisasi fiskal mulai diterapkan pada tahun 2001, dana perimbangan adalah komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan tercapai apabila belanja langsung yang dilaksanakan di daerah dimanfaatkan dalam rangka mendanai pelaksanaan pengembangan di daerah. Adanya pengaturan dana yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah serta pengalokasian pembiayaan atau belanja yang tepat guna sehingga tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dan

level kemakmuran masyarakat pun ikut naik. Dengan ikut naiknya taraf kemakmuran masyarakat sehingga terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

2. Kajian Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil kajian penelitian ini memperlihatkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil kajian penelitian ini dapat menjelaskan bahwa bila Dana Bagi Hasil Pajak naik maka Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) akan naik sebaliknya jika Dana Bagi Hasil turun maka Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) juga akan menurun. Setiap daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai bidang sektor unggulan masing-masing dalam hal keuangan dan hal ini tergantung pada Pemerintah Daerah itu sendiri dalam menggali dan menumbuhkan potensi-potensi dalam komponen Dana Bagi Hasil Pajak.

Dana Bagi Hasil Pajak bermaksud untuk mengurangi ketimpangan vertikal pusat dan daerah. Namun, pola bagi hasil tersebut dapat berpotensi mempertajam kesenjangan horisontal yang dialami antara daerah penghasil dan tidak berpenghasil. Kesenjangan horisontal tersebut disebabkan karena kondisi lapangan di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki karakteristik yang beraneka ragam.

3. Kajian Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil kajian penelitian ini memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh positif tetap dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Artinya apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), akan meningkat. Sebaliknya jika Dana Alokasi Khusus (DAK) pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut akan mengalami penurunan.

Penggunaan Dana Alokasi Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah bermaksud untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyelaraskan arus pertumbuhan antardaerah serta pelayanan antarsektor. Sejak tahun 2006 - 2015 terdapat tujuh bidang pelayanan pemerintahan yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana jalan, irigasi, dan air bersih), prasarana pemerintahan, pertanian, perikanan serta lingkungan hidup.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan Terhadap

Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Tengah.

Saran

- 1) Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar meningkatkan Bagi Hasil Pajak melalui kegiatan seperti: (1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan pendidikan, (2) Memaksimalkan sistem data dan informasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, (3) meningkatkan sosialisasi tentang manfaat Dana Bagi Hasil Pajak.

- 2) Kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar meningkatkan Dana Alokasi Khusus dengan cara melakukan koordinasi berupa kelengkapan data-data sarana prasarana daerah yang lengkap seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Daftar Rujukan

- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indonesia, P. R. (2000). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sadono, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

